



# BAB

## PENDAHULUAN

-  Latar Belakang
-  Tujuan
-  Tugas dan Fungsi
-  Keragaan SDM
-  Sistematika Laporan Kinerja

---

# I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 telah menetapkan misi yang salah satunya terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019 - 2024 ditetapkan dengan memperhatikan tiga dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan melalui pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional/nawacita. Kebijakan pokok diarahkan: (i) Membangun kedaulatan yang

---

mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; (ii) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; (iii) Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

## **B. TUJUAN**

Laporan Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan II Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari penyusuna Laporan Kinerja ini, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan II Tahun 2022.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP).

---

Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penelitian penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
2. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan

---

informasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;

3. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
4. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
5. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
6. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



*Gambar 1.* Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 48/PERMEN-KP/2020

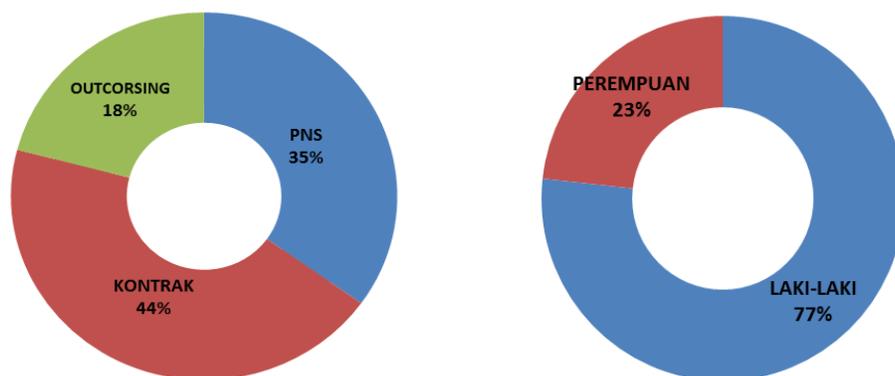
Kemudian terdapat perubahan lagi pada struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



*Gambar 2.* Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

#### **D. KERAGAAN SDM LRSDKP**

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dan memiliki pegawai yang berjumlah 43 orang, yang terdiri dari 15 PNS (34,8%) dan 19 Tenaga Kontrak (44,1%) dan 9 Tenaga Outcorcing (20%). Pegawai PNS 14 orang di kantor LRSDKP dan 1 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai kontrak 9 orang di kantor LRSDKP dan 10 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga Outcorsing 7 orang berada di kantor LRSDKP dan 2 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada Triwulan II tahun 2022.



*Gambar 3.* Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2022

## E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan II tahun 2022
2. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2022 dan pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi analisis terhadap capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
5. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi Triwulan II tahun 2022; dan
6. **Lampiran-lampiran :**
  - a. Perjanjian Kinerja awal tahun 2022
  - b. Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2022



# BAB

## PERENCANAAN KINERJA



-  Rencana Strategis
-  Rencana Kerja Tahunan
-  Perjanjian Kinerja
-  Pengukuran Kinerja

**LOKA RISER SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

---

## II. PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

---

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020 - 2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BRSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

---

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020 - 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020- 2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

## **I. Visi**

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk

---

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

## **2. Misi**

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

## **3. Tujuan**

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

## **4. Sasaran Strategis**

Renstra LRSDKP Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir merupakan kondisi yang akan dicapai sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC).

---

LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel, Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 3 (Tiga) sasaran Kegiatan (SK) yang harus dicapai, untuk Triwulan II ini ada perubahan peta strategis dari 3 Sasaran Kegiatan pada Triwulan I berubah menjadi 2 Sasaran Kegiatan pada Triwulan II. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK).

**Sasaran Kegiatan Kedua (SK-1)** yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan, dengan indikator Sasaran Kegiatan:

- Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket) dari 5 paket tahun 2022. Mulai tahun 2022 mengalami perubahan Tusi Kelembagaan sehingga Tidak melakukan riset lagi.

**Sasaran Kegiatan Ketiga (SK-2)** yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir, dengan indikator kinerja:

- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) dari 100% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2024
- Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen) adalah  $\leq 1$  setiap tahunnya dari 2022 sampai 2024
- Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks) dari 76 tahun 2022 menjadi 76 tahun 2024
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP dari 92% pada tahun 2022 menjadi 92% pada tahun 2024
- Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen) pada tahun 2022 sebesar 86%

- 
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) sebesar 70% pada tahun 2022
  - Nilai IKPA Satker LRSDKP dari 89 tahun 2022 menjadi 89 tahun 2024
  - Nilai kinerja anggaran (NKA) Satker LRSDKP dari nilai 81 tahun 2022 menjadi sangat baik tahun 2024
  - Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja), dari 1 unit kerja pada tahun 2022 menjadi 1 pada tahun 2024

## 5. Potensi dan Permasalahan

### a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti oceanografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

### b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

## **B. RENCANA KERJA TAHUN 2022**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.412.147.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 5 output yakni:

- Output Cadangan/pengadaan Barang Jasa Rp1.500.000.000,-
- Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Rp1.500.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp5,268,723,000,-
- Layanan Manajemen SDM Internal Rp24.000.000,-
- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp119,424,000,-

Kemudian mengalami pemotongan pada bulan juni sehingga pagu anggaran menjadi Rp6.912.147.000 yang terbagi dalam 4 output antara lain

- Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Rp1.500.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp5,268,723,000,-
- Layanan Manajemen SDM Internal Rp24.000.000,-
- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp119,424,000,-

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi LRSDKP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran strategis LRSDKP.

IKU LRSDKP pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 per- Januari 2022, terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan dengan 10 Indikator Sasaran Kegiatan bidang riset dan SDM KP. Pada PK revisi per- Februari 2022, terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Sasaran Kegiatan terdapat perubahan sebagai berikut :

Penambahan IKU yakni “Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)”. Kemudian mengalami perubahan lagi per-mei yaitu berkurangnya Sasaran Kegiatan dari 3 SS menjadi 2 SS dan juga dari 11 IKU menjadi 10 IKU, untuk sasaran kegiatan yang dihapus adalah SS 1 “Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan” dan IKU 1 juga “Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit)

Selanjutnya, Sasaran Strategis LRSDKP tahun 2022 yang telah ditetapkan, dijabarkan ke dalam indikator kinerja dengan target kinerja, 2 (Dua) Sasaran Kegiatan LRSDKP yang diwujudkan oleh 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Kegiatan, Rincian dan target Perjanjian Kinerja LRSDP pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2022 berdasarkan Balanced Score Card

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	5
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100
		3	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1

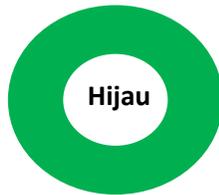
	4	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76
	5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
	6	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86
	7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70
	8	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
	9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81
	10	Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1

## D. PENGUKURAN KINERJA

### 1. Rumus Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

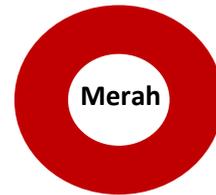
1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



**Baik**  
( Skor  $\geq$  100 )



**Hati-hati**  
( 80  $\leq$  Skor < 100 )



**Buruk**  
( Skor < 80 )

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).

## 2. Metode Pengukuran Kinerja

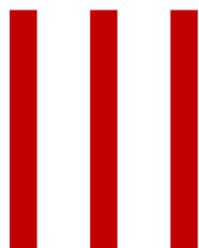
Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja LRSDKP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Keputusan Kepala Loka Riset tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LRSDKP.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua Bidang yang ada di LRSDKP. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Koordinator Tata Operasional. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Bagian Program merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



# BAB

## AKUNTABILITAS KINERJA

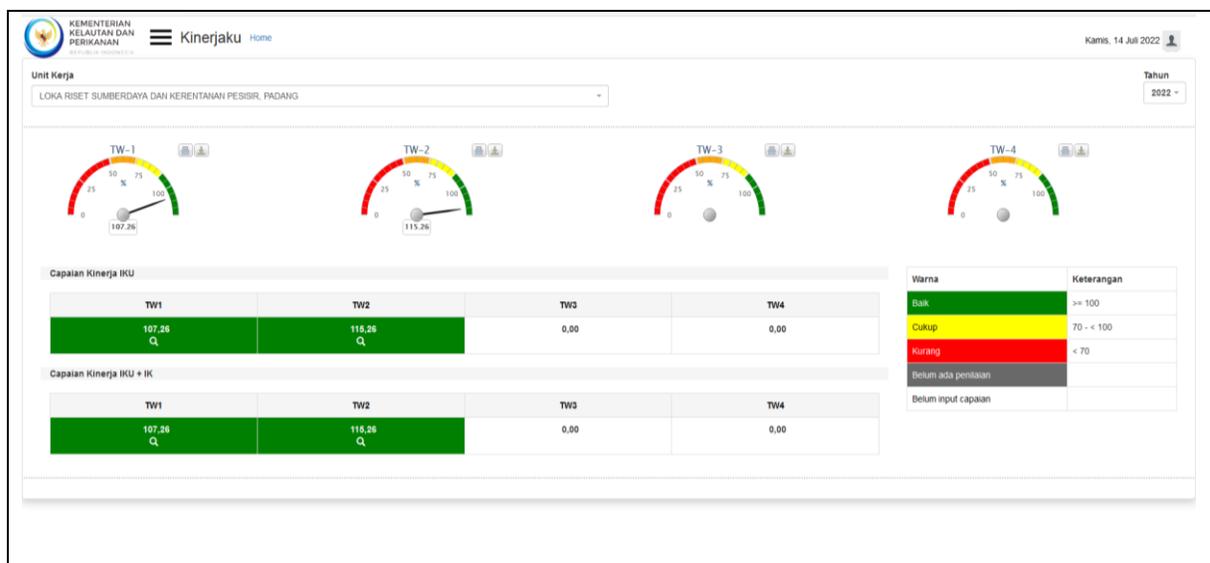


- ✦ Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II 2022
- ✦ Evaluasi dan Analisis Kinerja
- ✦ Akuntabilitas Keuangan

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PRESTASI IKU TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP triwulan II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id> Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 sebesar 115,26, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan II tahun 2022 ini, menunjukkan bahwa terdapat 5 IKU yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKU 2 target triwulan II 100% dan terealisasi 100%, IKU 4 target triwulan II adalah 50 dan tercapai 78,56, IKU 6 target triwulan II adalah 86 dan terealisasi 100, IKU 7 target triwulan II adalah 70 dan tercapai 100%, IKU 8 target triwulan II adalah 70 dan terealisasi 89,98.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2022 dapat tercapai.

**Tabel 2.** Capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2022

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target 2022	Triwulan II Tahun 2022	
				T	R
1	Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	1 Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	5		
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100	100	100
		3 Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1		
		4 Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76	50	78,56
		5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92		

		6	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86	86	100
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70	70	100
		8	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89	70	89,98
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81		
		10	Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1		

## SASARAN KEGIATAN 1

Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan

### INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 1

*Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)*

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya baru akan diukur pada triwulan berikutnya.

## SASARAN KEGIATAN 2

Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir

### INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2

*Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)*

---

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal satker LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dalam hal Layanan Perkantoran dan layanan umum Riset Kelautan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dan Monitoring dan Evaluasi Riset Kelautan, Layanan Kerjasama Riset Kelautan.

#### FORMULASI

- A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.
- D. Formula : *Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal* =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Terdapat 3 buah layanan yang menjadi target tahun 2022 ini yakni: Layanan dibawah tanggung jawab Tata Usaha, Layanan dibawah tanggungjawab Tata Operasional, Layanan dibawah tanggungjawab Pelayanan Teknis. Sampai dengan akhir Triwulan II tahun anggaran 2022 dari ketiga layanan tersebut telah terealisasi sehingga capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Layanan Dukungan Manajemen Internal satker bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Capaian IKU 2 LRSDKP Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	TARGET TW II 2022	REALISASI TW II 2022
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100	100	100

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100 persen.

Secara umum, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP, diantaranya:

1. Adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.
2. Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing layanan ini.

### **INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 3**

***Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)***

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya baru akan diukur pada triwulan berikutnya

### **INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 4**

***Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)***

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP pada Triwulan II sebagai berikut:

**Tabel 4.** Capaian IKU 4 LRSDKP Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	TARGET TW II 2022	REALISASI TW II 2022
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	4	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76	50	78,56

Indeks Profesional ASN satker LRSDKP Triwulan II ini telah mencapai target yakni 78,56 (120%) dari target 50 pada Triwulan II. Capaian ini diperoleh dengan dukungan masing-masing komponen sebagai berikut: Kualifikasi pendidikan 15.59, Kompetensi 33.39, Kinerja 25, dan Disiplin Pegawai 4.88.

Keberhasilan dari pencapaian IKU Indeks Profesional ASN satker LRSDKP Triwulan II ini ditopang oleh :

1. Peningkatan profesionalisme ASN melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara daring;
2. komitmen pimpinan dan inisiasi E-milea sebagai saluran pelaksanaan pelatihan kompetensi aparatur secara daring;
3. keaktifan pegawai dan operator dalam pemutakhiran data.

Tercapainya target Nilai IP ASN LRSDKP ini mencerminkan adanya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Pandemi ini juga memaksa unit organisasi dan seluruh pegawai untuk bertransformasi ke era digital. Pelaksanaan rapat, pelatihan, seminar secara daring sangat efektif untuk penggunaan waktu kerja yang banyak dilakukan di rumah (work from home) sehingga pemanfaatan sumber daya berbasis digital seperti laptop, PC, ponsel dan jaringan internet menjadi lebih efisien.

## INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 5

### *Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)*

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya baru akan diukur pada triwulan berikutnya

## INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 6

### *Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)*

Indikator ini didefinisikan sebagai bagaimana pengetahuan dapat disampaikan atau disebarkan dalam suatu media. Ruang lingkup manajemen pengetahuan di tahun 2022 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di LRSDKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu: (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) meliputi Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2022, Manual IKU 2022, Rencana Kerja Tahunan 2022, Renaksi Kinerja atas PK Tahunan 2022 dan Laporan Kinerja tahun 2021. (ii) Keikutsertaan Pejabat administratif sampai dengan staf unit kerja (bobot 10%), Pimpinan Unit Eselon I–II, JFT (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator), Staf Pelaksana (minimal 2 orang), Keaktifan Pejabat administratif unit kerja 3 kali dalam 1 triwulan upload berita (bobot 70%), **Pimpinan Unit Eselon II dan JFT** yang diberikan tugas tambahan sebagai **Koordinator dan Sub Koordinator**

Capaian IKU Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II sebagai berikut:

*Tabel 5. Capaian IKU 6 LRSDKP triwulan II tahun 2022*

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	TARGET TW II 2022	REALISASI TW II 2022
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	6	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86	86	100

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2022 mencapai nilai 100% dari target sebesar 86%.

Hasil yang didapatkan dapat diuraikan dalam perhitungan dibawah ini:

No	Komponen	Target	Capaian	%
1	Dokumen	20.00	20	100,00
2	Keikutsertaan	10.00	10	100,00
3	Keaktifan	56.00	70	125,00
		86.00	100	

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU 6 pada triwulan II ini secara umum adalah:

- 1) Komunikasi yang rutin dan kontinyu dengan pengelola bitrix dan juga bagian datin pusriskel.
- 2) Persentase nilai komponen dokumen 20,00% karena dokumen yang ditargetkan sudah diunggah pada sharing dokumen pada aplikasi bitrix24.
- 3) Persentase nilai keikutsertaan sebesar 10,00% karena Pimpinan dan Staff LRSDKP sudah berkontribusi dalam keikutsertaan dari tahun sebelumnya.
- 4) Persentase nilai keaktifan sebesar 70% karena Pimpinan LRSDKP dan 3 koordinator sudah berkontribusi aktif dari tahun sebelumnya dengan upload berita yang mengandung 5W + 1H dalam aplikasi Bitrix24.

Capaian ini sudah maksimal 100% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media bitrix ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

## INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 7

### *Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)*

IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LRSDKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh LRSDKP yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) sebagai berikut:

**Tabel 6.** Capaian IKU 7 LRSDKP triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	TARGET TW II 2022	REALISASI TW II 2022
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70	70	100

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%) telah mencapai target yaitu 100% dari target 70%, karena tahun 2021 kemarin dan juga Sampai dengan tahun 2022 Triwulan II ini LRSDKP tidak ada kunjungan dari itjen sehingga tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti dan atas anjuran dari sekretariat BRSDM maka realisasi satker yang tidak ada kunjungan dan tidak ada temuan itjen maka nilai realisasinya adalah 100%.

Tercapainya IKU ini (tidak ada pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LRSDKP. sering adanya komunikasi tentang realisasi anggaran antara kepala UPT dengan Pusat riset kelautan juga merupakan langkan untuk menghindari adanya pengawasan ITJEN

## INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 8

### Nilai IKPA Satker LRSDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA (bobot 10), Deviasi Halaman III DIPA (Bobot 10), Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Belanja Kontraktual (Bobot 10), Penyelesaian Tagihan (Bobot 10%), Pengelolaan UP dan TUP (10), Dispensasi SPM (Bobot 5), Capaian Output (Bobot 25). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Capaian atas indikator kinerja utama nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP dideskripsikan sebagai berikut.

**Tabel 7.** Capaian IKU 8 LRSDKP triwulan II tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	TARGET TW II 2022	REALISASI TW II 2022
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	8	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89	70	89,98

Capaian indikator kinerja utama nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2022 tercapai sebesar 89.98 dari target yang ditetapkan yaitu 70 pada Triwulan II ini.

Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa indikator seperti Realisasi Anggaran, halaman III DIPA, dan capaian Output, Langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan nilai IKPA ke depan antara lain:

- 
- a. Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
  - b. Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN.
  - c. Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.
  - d. Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Jika terdapat retur SP2D berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaian max 7 hari kerja.
  - e. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administrative penyesuaian halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal.
  - f. Selektif dalam revisi DIPA kategori pagu tetap, batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan.
  - g. Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP dan Teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP).
  - h. Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif;
  - i. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

## INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 9

### Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kerjanya baru akan diukur pada triwulan berikutnya

## INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 10

### Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kerjanya baru akan diukur pada triwulan berikutnya

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan triwulan II tahun 2022, data per 30 Juni 2022, terdapat pada Tabel berikut:

*Tabel 8.* Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2022

No	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%	Keterangan
1	6.912.147.000,-	2.185.797.362,-	9,92	7.576.870.755,-	31,6	Realisasi sampai dengan 30 juni 2022

Realisasi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan KERENTANAN Pesisir Triwulan II tahun 2022, data per tanggal 30 juni 2022 adalah sebesar 31,6% yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp1.024.680.548 atau 47,78%, Belanja Barang sebesar Rp 1.161.116.814 atau 24,35%.

Secara umum kinerja LRSDKP pada Triwulan II tahun 2022 telah berjalan cukup baik walaupun capaian realisasi anggaran masih relatif rendah yakni 31,6 % tetapi tingkat konsistensi sebagaimana pada evaluasi Smart DJA sudah cukup bagus yakni 98,99%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada POK. Namun demikian, capaian realisasi anggaran per sasaran strategis belum dapat ditampilkan dikarenakan keterbatasan informasi pada aplikasi Sakti Hal ini

menjadi catatan untuk bagaimana dapat menyajikan data capaian per Sasaran Strategis. Anggaran kegiatan per sasaran Strategis sebagai berikut:

**Tabel 9.** Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kegiatan	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%	
1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	1). Kajian Terintegrasi Dinamika dan Mitigasi Kerentanan Pesisir di Kawasan Perikanan Budidaya Kab. Pematang Jaya dan Kep.Meranti	401.812.000	Diblokir	
		2). Kajian Indeks Kesehatan Laut di Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman	208.188.000	Diblokir	
		3). Penilaian Situs Kapal Tenggelam (Japanese Cargo Shipwreck) di Desa Wairterang, sebagai Potensi Wisata Bahari Kab. Sikka, NTT	350.000.000	Diblokir	
		4). Identifikasi Sampah Laut dan Pesisir Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung)	300.000.000	Diblokir	
		5) Aplikasi Teknologi Membran untuk Peningkatan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan	240.000.000	Diblokir	
2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP	Pelayanan Kehumasan Riset Kelautan	8.010.000	6.471.023	80,79
		Pelayanan Kerjasama Riset Kelautan	16.990.000	6.114.244	35,9
		Pelayanan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Riset Kelautan	13.200.000	0	0
		Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Kelautan	75.000.000	2.621.493	3,50
		Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Kelautan	75.000.000	5.238.573	6,98
		Gaji dan Tunjangan	2.144.635.000	1.024.680.548	47,78
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.878.512.000	1.084.248.931	37,62
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25.000.000	3.435.006	13,74
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9.424.000	0	0
3	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	Pelayanan Keuangan Riset Kelautan (pelaporan Keuangan)	17.500.000	9.477.295	54,16
4	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	perencanaan dan pengembangan SDM LRSDKP	24.000.000	0	0

5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi (LRSDKP)	25.000.000	3.367.533	13,47
6	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	Pelayanan Sistem Informasi Riset Kelautan	5.288.000	160.000	3,03
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	Pelayanan Organisasi Riset Kelautan	46.800.000	26.910.416	57,50
8	Nilai IKPA Satker LRSDKP	Pelayanan Keuangan Riset Kelautan (pelaporan Keuangan)	17.500.000	9.477.295	54,16
9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25.000.000	3.435.006	13,74
10	unit kerja lingkup Pusriskel yg menerapkan inovasi pelayanan publik	Pelayanan Sistem Informasi Riset Kelautan	5.288.000	160.000	3,03
			<b>6.912.147.000</b>	<b>2.185.797.362</b>	<b>31,6</b>

## D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat

mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran LRSDKP sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 10.** Perhitungan Efisiensi Anggaran LRSDKP TW II Tahun 2022

Capaian Sasaran Program	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
0	31,6	98,99	1	-20	0

Nilai efisiensi anggaran LRSDKP memperoleh skor 0. nilai efisiensi 0 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada triwulan II 2022, tingkat efisiensi Rendah efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan pada level Rendah. Hal ini karena nilai efisiensi dihitung dari perolehan efisiensi. Dimana rentang efisiensi dari -20 sampai +20. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran pada triwulan berikutnya, sehingga diperoleh nilai efisiensi positif (+20).

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada LRSDKP yaitu;

- a. Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan LRSDKP berupa pemangkasan alokasi anggaran perjalanan dinas, pertemuan. dialihkan untuk kebutuhan penanggulangan covid 19 beserta dampaknya.
- b. Pelaksanaan, strategi pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi terutama dalam hal perjalanan dinas/paket meeting, sehingga volume capaian dapat melebihi target atau dipergunakan untuk output baru. Implementasi efisiensi ini diantaranya berupa:

- 
- 
- ❖ Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan blended (tatap muka dan daring);
  - ❖ Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan pimpinan berbasis Balance Score Card dan SKP;
- c. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
- ❖ Dilaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang undangan secara rutin dan berkala dengan memaksimalkan aplikasi monitoring dan evaluasi yaitu SMART DJA, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, Edalwas KKP, Kinerjaku KKP, E-Pegawai KKP, serta Dashboard dan Weekly Report BRSDM;
  - ❖ Dilaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan LRSDKP dalam bentuk pertemuan daring secara rutin dan berkala;
  - ❖ Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.
- d. Penyesuaian
- Melakukan penyesuaian dengan cara revisi untuk mendukung program prioritas nasional, pergeseran output belanja pegawai untuk kebutuhan penanggulangan covid di lingkup KKP.



# BAB

PENUTUP

# IV

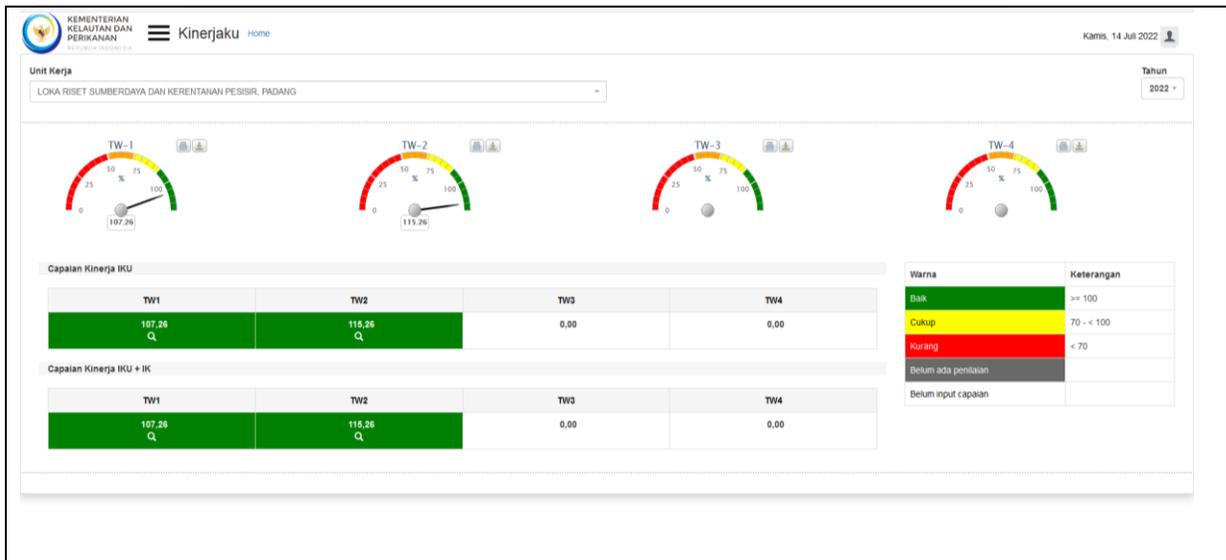
- ✚ Capaian Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2022
- ✚ Permasalahan dan Rekomendasi

## IV. PENUTUP

### A. Capaian Kinerja Utama

Pada tahun 2022, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, dari 10 IKU LRSDKP, terdapat 5 IKU berstatus hijau dan untuk indikator lain akan diukur pada triwulan berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP triwulan II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP di tingkat korporat triwulan II tahun 2022 sebesar 115,26%, sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

---

Rincian Target dan Realisasi dari 5 IKU tersebut adalah :

1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen), Target Triwulan II sebesar 100 dengan capaian 100 atau (100%).
2. Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks), Target Triwulan II sebesar 50 dengan capaian 78,56 atau 120%.
3. Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen), Target Triwulan II sebesar 86 dengan capaian 100 atau 116,27%.
4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen), Target Triwulan II sebesar 70 dengan capaian 100 atau 142%.
5. Nilai IKPA Satker LRSDKP, Target Triwulan II sebesar 70 dengan capaian 89,98 atau 120%.

## **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI**

### **Pemasalahan.**

Berdasarkan capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2022 sudah tergolong Cukup, namun ada kendala yang dihadapi seperti hal berikut :

1. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyampaian data dukung bersamaan dengan penyampaian data capaian. Oleh karena itu, masing-masing Penanggung jawab IKU agar memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka akuntabilitas dan ketelusuran.
2. IKU dengan Capaian Triwulan Melampaui Target Tahunan, Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks), Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen), dan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen).

- 
3. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU, sehingga capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
  4. Realisasi yang terhambat pada triwulan I membuat dampak pada Triwulan selanjutnya, sehingga banyak hal yang seharusnya teralisasi pada Triwulan I malah terealisasi pada Triwulan II, III dan IV. Untuk kegiatan riset dan pengadaan barang dan jasa masih dalam posisi terblokir karena masih dalam transisi kepindahan pegawai dari KKP ke BRIN.
  5. Realisasi anggaran persasaran program perlu dilakukan upaya untuk dapat disajikan realisasi anggaran pada masing-masing Sasaran Program.

#### Rekomendasi.

1. Mengadakan pertemuan secara rutin dengan para penanggungjawab IKU untuk mengetahui progres kemajuan dari IKU tersebut serta kalau terdapat kendala segera bisa untuk melakukan antisipasi.
2. Melakukan monitoring secara berkala Terhadap capaian atas indikator-indikator ini sehingga tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.
3. Melakukan pemantauan perkembangan progres dari masing-masing IKU yang telah ditetapkan.
4. Menunggu proses transisis pegawai dari KKP ke BRIN selesai.
5. Menyajikan anggaran pada masing-masing program secara jelas dan lengkap sebagai bukti atas capaian kinerja yang telah dicapai.

**PK LRSDKP 2022 AWAL**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
**PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Naelul Hasanah Ridwan  
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Radiarta  
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

<p>Pihak Kedua Kepala Pusat Riset Kelautan</p>  <p>I Nyoman Radiarta</p>	<p>Pihak Pertama Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir</p>  <p>Nia Naelul Hasanah Ridwan</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
**PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
<b>KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan <sup>a,b</sup></b>				
SK.1.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	ISK.1.1.1	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (Unit) <sup>a,b</sup>	1
<b>KEGIATAN 2. Riset Kelautan <sup>c</sup></b>				
SK.2.1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	ISK.2.1.1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) <sup>c</sup>	5
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP <sup>b</sup></b>				
SK.3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	ISK.3.1.1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) <sup>b</sup>	100
		ISK.3.1.2	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LRSDKP (Persen)	≤1
		ISK.3.1.3	Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP (Indeks)	76
		ISK.3.1.4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		ISK.3.1.5	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LRSDKP (Persen)	86
		ISK.3.1.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LRSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		ISK.3.1.7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		ISK.3.1.8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan <sup>a,d</sup>	1.500.000.000
2	Riset Kelautan <sup>e</sup>	1.500.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP <sup>d</sup>	5.412.147.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>8.412.147.000</b>

)<sup>a</sup> Output Cadangan

)<sup>b</sup> Automatic Adjustment

)<sup>c</sup> Blokir

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua  
Kepala Pusa: Riset Kelautan

I Nyoman Radjarta

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber  
Daya dan Kerentanan Pesisir

Nia Naelul Hasanah Ridwan

## PK LRSDKP 2022 REVISI



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 3 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711583  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**  
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**  
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2022

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Kelautan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber  
Daya Dan Kerentanan Pesisir

Nia Naelul Hasanah Ridwan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
**PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
<b>KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan <sup>a,b</sup></b>				
SK.01	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	IKSK.01.01	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit)	1
<b>KEGIATAN 2. Riset Kelautan <sup>c</sup></b>				
SK.02.	Tersedianya Data, Informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	IKSK.02.01	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	5
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP <sup>b</sup></b>				
SK.03	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	IKSK.03.01	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100
		IKSK.03.02	Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1
		IKSK.03.03	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤ 1
		IKSK.03.04	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76
		IKSK.03.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		IKSK.03.06	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86
		IKSK.03.07	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindakanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70
		IKSK.03.08	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		IKSK.03.09	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan <sup>a,b</sup>	1.500.000.000
2	Riset Kelautan <sup>c</sup>	1.500.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP <sup>b</sup>	5.412.147.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>8.412.147.000</b>

<sup>a</sup> Output Cadangan

<sup>b</sup> Automatic Adjustment

<sup>c</sup> Blokir

Jakarta, Februari 2022

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Kelautan

  
Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber  
Daya Dan Kerentanan Pesisir

  
Nia Naelul Hasanah Ridwan

## PK LRSDKP 2022 REVISI 2



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**  
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**  
Jabatan : Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Mei 2022

Pihak Kedua  
Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan

**Rudi Alek Wahyudin**

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber  
Daya dan Kerentanan Pesisir

**Nia Naelul Hasanah Ridwan**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
**PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	1 Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) <sup>a</sup>	5
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) <sup>b</sup>	100
		3 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LRSDKP (Persen)	≤1
		4 Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP (Indeks)	76
		5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LRSDKP (Persen)	86
		7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LRSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		8 Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		9 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81
		10 Unit kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit Kerja)	1

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Riset Kelautan <sup>a</sup></b>		
1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	1.500.000.000
<b>Dukungan Manajemen <sup>b</sup></b>		
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	5.412.147.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>6.912.147.000</b>

Catatan:

<sup>a</sup> Blokir

<sup>b</sup> Automatic Adjustment

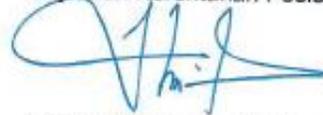
Jakarta, 12 Mei 2022

Pihak Kedua  
Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber  
Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan